

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah. Desentralisasi secara garis besar mencakup dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: penegakan hukum terpadu dalam perkara tindak pidana pilkada tahun 2018 di Kabupaten Cirebon dan terdapat kendala di dalam penegakan hukum terpadu tindak pidana pilkada tahun 2018 di Kabupaten Cirebon dan solusinya.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Ketua Bawaslu, Polri, Jaksa di wilayah Kabupaten Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori penegakan hukum dan efektivitas hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penegakan Hukum Terpadu Dalam Perkara Tindak Pidana Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Cirebon adalah oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu yang tergabung dalam Sentra Penegak hukum terpadu (Gakkumdu), dengan menyesuaikan pada sistem peradilan pidana sebagaimana diatur secara umum dalam KUHAP, meliputi penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan dan putusan pidana oleh Pengadilan. Pengaturan dan pengecualian secara khusus hukum beracara untuk menyelesaikan tindak pidana Pemilu diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Peran penting Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu adalah menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dari Panwaslu dan KPU. Koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana "*money politics*" terhadap sistem Pemilu Kepala Daerah yaitu Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu adalah menerima laporan pelanggaran Pemilu. Dalam teknisnya, Sentra Gakkumdu melakukan penelitian dan pengkajian melalui mekanisme gelar perkara setiap laporan pelanggaran yang diterima dari Panwaslu. Sehingga dalam pelaksanaan tugas di Sentra Gakkumdu tersebut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam pelaksanaan tugas yang bersifat internal maupun eksternal, sesuai dengan asas *Integrated Criminal Justice System*. Kendala di dalam Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Cirebon dan solusinya karena ancaman pidananya yang kurang sehingga masih banyak oknum-oknum yang merasa tidak jera dan ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain, sementara dalam faktor penegak hukum kurangnya anggota atau penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Cirebon yakni meningkatkan kualitas personel, mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia, dan melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Kata kunci : Penegakan Hukum Terpadu, Tindak Pidana, Pilkada

ABSTRACT

Direct regional head elections (pilkada) are one of the goals of decentralization within the framework of regional autonomy. Decentralization broadly includes two aspects, namely administrative decentralization and political decentralization. The formulation of the problem in this research is: integrated law enforcement in the 2018 post-conflict local election criminal case in Cirebon Regency and there are obstacles in the integrated law enforcement of the 2018 post-conflict local election criminal law in Cirebon Regency and the solution.

The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and the specifications in this study include descriptive analytical. As for the sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviews with the Head of Bawaslu, Polri, prosecutors in Cirebon Regency. And secondary data obtained from literature studies related to law enforcement theory and law effectiveness.

Based on the results of the research that the Integrated Law Enforcement in Criminal Cases in the 2018 Pilkada in Cirebon Regency is by the Police, Attorney General's Office and Panwaslu who are members of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu), by adjusting the criminal justice system as generally regulated in the Criminal Procedure Code, including investigations by the Police, prosecution by the Attorney General's Office and criminal decisions by the Court. Regulations and exceptions specifically for procedural law to resolve election crimes are regulated by Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors. The important role of the Gakkumdu Center in handling Election criminal violations is to receive reports of Election violations at every stage of the Regional Head Election from the Panwaslu and the KPU. Coordination between Bawaslu, the Police, and the Attorney General's Office in resolving the crime of "money politics" against the Regional Head Election system, namely the Gakkumdu Center in handling election criminal violations is to receive reports of Election violations. Technically, the Gakkumdu Center conducts research and studies through the case title mechanism for every violation report received from Panwaslu. So that in carrying out the duties at the Gakkumdu Center, it is mandatory to apply the principles of coordination, integration and synchronization both in the implementation of internal and external tasks, in accordance with the principles of the Integrated Criminal Justice System. Constraints in the Integrated Law Enforcement of Criminal Actions in the 2018 General Election in Cirebon Regency and the solution is due to the lack of criminal threats so that there are still many people who feel they are not deterred and want to take advantage of the existing situation without thinking about anything else, while in law enforcement factors there are less members or investigators who are truly competent in handling the case so that in the investigation process a little constrained. Efforts Made in Overcoming Barriers to Integrated Law Enforcement of the 2018 Regional Election of Crime in Cirebon Regency are improving the quality of personnel, utilizing available facilities and infrastructure, and conducting socialization to the community.

Keywords: Integrated Law Enforcement, Crime, Pilkada